

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam masyarakat yang demokratis partai politik mendapat peranan yang sangat penting. Semakin berkembangnya aspirasi-aspirasi politik dari masyarakat membuat partai politik menjadi sebuah lembaga yang dianggap mampu berperan sebagai saluran aspirasi tersebut. Selain itu keinginan untuk dapat lebih berpartisipasi di bidang politik juga semakin menguatkan alasan pentingnya peranan sebuah partai politik di dalam sebuah negara yang demokratis. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Jimly Asshidiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. “Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara”¹

Lebih lanjut Jimly mengutip pendapat seorang ahli yaitu Schattscheider (1942) yang mengatakan bahwa justru partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi di sebuah negara. “*Political parties created democracy*”, sehingga kehadiran partai politik dalam sebuah negara yang demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Artinya partai politik adalah elemen yang tidak dapat

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 401.

dilepaskan dari sebuah negara demokratis. Dalam struktur politik, partai politik terdapat pada tataran infrastruktur politik. Infrastruktur dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya, dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jelas maksudnya bahwa partai politik adalah sebuah institusi yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

Dalam teori demokrasi modern, partai-partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Partai-partai dianggap memainkan peranan menyeluruh sebelum, selama dan sesudah pemilu. Berbeda dengan kelompok kepentingan, partai-partai menjangkau suatu lingkup kepentingan manusia secara luas.²

Setiap negara mempunyai dinamika perkembangan partai politik yang berbeda-beda. Di Indonesia munculnya sebuah organisasi politik ditandai oleh momen kebangkitan nasional. Karena organisasi modern yang muncul paling pertama adalah *Boedi Oetomo*, didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908. Setelah hal itu kemudian bermunculan organisasi-organisasi lain, mulai dari Sarekat Islam, Muhammadiyah, *Indische Partij*, *Indische Social Demokratische Vereneeging*, Partai Komunis Indonesia hingga Partai Nasionalis Indonesia. Perkembangan partai politik terus berkembang di era kemerdekaan. Pada awal-

² Hans-Dieter Klingeman, Richard I Hofferbert, Ian Budge, *Partai, Kebijakan & Demokrasi*, (Yogyakarta: Jentera, 2000), h. 392.

awal kemerdekaan pemerintah melalui Kementerian Penerangan tahun 1951 mengeluarkan klasifikasi kepartaian yang ada di Indonesia. Yang pertama partai politik yang berdasar pada asas Ketuhanan. Partai-partai yang termasuk pada klasifikasi ini ada Masyumi, PSII Perti, Parkindo dan lainnya. Yang kedua partai politik yang berdasar pada asas kebangsaan. Partai yang memiliki asas kebangsaan cukup banyak kehadirannya, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Indonesia (PRI), hingga Partai Demokrasi Rakyat. Klasifikasi yang ketiga adalah partai yang berasas Marxisme, contohnya PKI, Partai Murba, dan Partai Buruh. Dan klasifikasi yang terakhir adalah partai politik yang berasas diluar ketiga asas yang disebutkan di atas. Contoh partai yang termasuk pada klasifikasi ini adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia.

Pada era orde baru ketika itu hanya ada tiga partai yang boleh ada dan ikut serta dalam Pemilu dikarenakan adanya penyeragaman asas partai politik. Hingga sampai pada akhir 1990-an bersamaan dengan bergantinya era orde baru ke era reformasi, perkembangan partai politik di Indonesia berkembang pesat ditandai dengan munculnya partai-partai baru dari berbagai macam ideologi, yang nasionalis, contohnya seperti Partai Demokrat hingga partai-partai yang memiliki asas keagamaan seperti Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Partai Keadilan (kini bernama Partai Keadilan Sejahtera).

Partai terakhir yang disebutkan di atas kini menjadi fenomena tersendiri di kancah perpolitikan Indonesia. Seorang peneliti dan pengamat dari *The Australian*

National University menyampaikan pendapatnya tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai berikut:

PKS adalah sebuah fenomena yang paling menarik dalam politik kontemporer Indonesia. Ini tidak hanya perkembangan partai yang sangat pesat dalam hal keanggotaan dan perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga karena PKS menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam yang hampir tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia.³

Khusus pada perolehan suara di pemilu, PKS menunjukkan sebuah statistik yang pesat perkembangannya. Disaat dominasi partai-partai nasionalis terus menjulang, PKS sebagai partai yang berasaskan pada keagamaan dapat mempertahankan eksistensinya. Walau dalam pemilu 1999 (saat itu masih bernama Partai Keadilan) hanya memperoleh suara 1.436.565. Persentasenya adalah sekitar 1,36% sehingga Partai keadilan tidak lolos *electoral threshold* karena itu pada tahun 2002 Partai Keadilan merubah nama mereka menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Di era Partai Keadilan Sejahtera, mereka mengalami peningkatan suara yang cukup signifikan pada pemilu tahun 2004. PKS memperoleh 8.325.020 atau sekitar 7,34% suara dan mendapat 45 kursi di DPR. Pada tingkat provinsi PKS mampu menang di DKI Jakarta, dan mendapat perolehan suara sekitar 20%. Hal ini membuat PKS dapat mengusung sendiri calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur pada pilukada di DKI Jakarta. Ketika 2007 saat pilukada DKI Jakarta PKS pada akhirnya memang sendirian mengusung calon Guberbur dan calon Wakil Gubernurnya, yaitu Adang Daradjatun-Dani Anwar tanpa ada koalisi dengan partai manapun. Berhadapan

³ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. (Bandung: Harakatuna, 2005), h.v

dengan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang ketika itu diusung oleh sekitar 20-an partai politik. Walaupun hasilnya pasangan yang diusung oleh PKS kalah, tetapi secara perolehan suara cukup mengejutkan, karena pasangan yang diusung PKS tanpa koalisi dengan partai manapun terlihat cukup dapat mengimbangi pasangan yang berkoalisi dengan puluhan partai. Pasangan pemenang ketika itu Fauzi Bowo-Prijanto memperoleh 57,87% sementara pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh 42,13%. Pada pemilu pada 2009 PKS memperoleh 8.206.955 suara atau sekitar 7,88% dan mendapat 57 kursi di DPR. Artinya PKS mengalami peningkatan persentase dan perolehan kursi di DPR. Jika dilihat dari hasil pemilu 2009, PKS menjadi satu-satunya partai Islam yang mengalami kenaikan persentase suara.

Greg Fealy mengatakan ada beberapa hal penting yang dapat dianalisis dari fenomena PKS di kancah perpolitikan Indonesia. Pertama, PKS tidak sama seperti partai Islam lain di Indonesia dalam hal mengambil inspirasi ideologi dan organisasi. PKS mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model acuan partainya. Buku-buku yang dijadikan rujukan oleh PKS dan para kadernya adalah buku-buku karya penulis-penulis dari kalangan Ikhwanul Muslimin seperti buku-buku Sayyid Quthb, Yusuf Qardhawi, dan tentu, buku Hasan Al-Banna. Fokus mereka pada isu-isu Timur-Tengah pun terlihat sangat mencolok. Seringnya aksi-sksi demonstrasi mendukung Palestina, identiknya kader PKS dengan simbol-simbol Hamas.

Banyaknya rujukan mereka terhadap Hasan Al-Banna atau Sayyid Quthb dalam dokumen-dokumen atau website, dan lukisan-lukisan menarik dari

peristiwa di Timur-Tengah, seperti simbol Hamas dan kaos bergambar para pemuda intifadhah Palestina sedang melempar batu kepada Israel. Kelompok-kelompok Islam lain, tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika-dinamika di luar Indonesia.⁴

Kedua, PKS adalah sebuah partai kader. Karena punya proses rekrutmen yang khusus dan ketat serta adanya pelatihan-pelatihan serta seleksi keanggotaan yang membuat partai ini menghasilkan kader-kader yang tidak hanya loyal dan berkomitmen pada partai, tetapi juga memiliki akar ideologi yang kuat.

PKS adalah satu-satunya partai kader yang murni dalam politik Indonesia saat ini. PKS memiliki proses rekrutmen yang khusus dan ketat, *training*, dan seleksi anggota yang dapat menghasilkan kader-kader dengan komitmen tinggi dan disiplin. Ketika kebanyakan partai-partai lain menunjukkan sedikitnya keterlibatan mereka secara langsung dengan kelompok akar rumput terutama di luar masa kampanye, sebaliknya partai ini terus melakukan pertemuan-pertemuan cabang secara regular, diskusi-diskusi, aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, dan *training* keagamaan.⁵

Ketiga, PKS memiliki agenda-agenda pelayanan sosial yang luas dan efektif. Program-program itu antara lain, bantuan pada korban bencana alam, bantuan kebakaran, pelayanan kesehatan umum. Hal itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga ada kontinuitas dalam pelayanan sosial. PKS menjadikan hal itu sebagai bukti dari pengabdian mereka terhadap masyarakat. Juga sebagai implementasi dari jargon “peduli” mereka.

Keempat, PKS menjadikan moralitas sebagai program utama mereka dalam berpolitik. Misalnya PKS memberi sanksi yang tegas jika terbukti ada

⁴ Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera. Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. (Bandung: Harakatuna, 2005), h.v-vi.

⁵ *ibid.*

kadernya yang memperoleh uang secara illegal. PKS secara keras menerapkan sikap anti-korupsi terhadap pemimpin dan kadernya di DPR. Terakhir, PKS dianggap sebagai partai yang sangat serius tentang masalah ideologi dan kebijakan dibanding partai-partai besar lainnya. PKS menunjukkan besarnya wacana internal partai tentang isu-isu yang bersifat konseptual dan doktrinal.

Pada poin kedua yang disebutkan Greg Fealy, terkait dengan PKS sebagai partai kader cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Kekuatan PKS untuk menggerakkan para anggotanya dianggap sebagai salah satu penyebab dapat konsistennya mereka dalam perpolitikan. Misalnya saja ketika pemilu, PKS memiliki basis kader yang dapat digerakan. Maka kerja-kerja dalam agenda pemilu akan terasa lebih mudah. Hasilnya pun terlihat saat ini, PKS dapat menjadi partai penantang yang cukup kuat bagi partai-partai lainnya baik partai berhaluan nasionalis maupun partai berhaluan agama yang sudah lebih mapan. Artinya PKS memiliki kemampuan untuk memajemen sumber daya manusianya.

Kekuatan PKS berada di kota-kota besar, seperti di wilayah-wilayah Jakarta. Kader-kader PKS di wilayah Jakarta misalnya, cukup aktif terlihat dalam agenda-agenda internal mereka maupun aktivitas yang terjun ke masyarakat, meski tidak dalam masa pemilu. Terlihat ketika ada kejadian bencana yang menimpa masyarakat, kader-kader PKS langsung membentuk pos penanggulangan bencana. Kesigapan para kader ini yang dibentuk dari kaderisasi mereka. Hal ini terkait dengan upaya PKS dalam memajemen sumber daya manusianya sehingga dapat langsung bergerak sesuai perintah struktural. Dalam

bidang politik pun ada dampak yang terasa. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah hasil pemilu. Pada pemilu legislatif 2004 untuk DPRD DKI Jakarta PKS berhasil menduduki peringkat pertama. Perolehan suara PKS ketika itu adalah 24%. PKS mendapatkan 18 kursi di DPRD DKI. Kemudian saat pemilu 2009 untuk DPRD DKI Jakarta, suara PKS menurun menjadi sekitar 18% namun PKS tetap mendapat 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Bahkan saat ini kader-kader PKS di DPRD DKI Jakarta menduduki posisi penting di struktur DPRD. Salah satunya adalah Triwisaksana yang menjadi Wakil Ketua DPRD DKI.

Berdasarkan pada fakta tersebut, maka akan menarik untuk dilakukan penelusuran serta penelitian yang lebih mendalam terkait kaderisasi yang diterapkan oleh PKS sebagai upaya manajemen SDM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemampanan latar belakang penelitian dapat teridentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana cara PKS dapat merekrut anggota baru?
2. Bagaimana cara PKS mengembangkan keanggotaannya?
3. Bagaimanakah PKS menanamkan ideologi partai ke kadernya?
4. Bagaimana PKS mampu mempertahankan ideologinya?
5. Bagaimana pola kaderisasi yang diberlakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka dibatasi permasalahan pada pola kaderisasi yang diterapkan PKS untuk mencapai kesuksesan politik. Sementara itu dilihat secara geografis, penelitian ini dibatasi pada wilayah di DKI Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah penelitiannya adalah : “Bagaimana pola kaderisasi yang diterapkan DPTW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta sebagai upaya manajemen SDM?”

Mengacu pada perumusan masalah yang telah ditentukan maka dengan ini disusunlah pertanyaan penelitian untuk membantu dalam menjawab permasalahan penelitian:

1. Apa saja jenis-jenis kaderisasi yang diterapkan PKS?
2. Bagaimana cara PKS merekrut anggota baru?
3. Bagaimana cara PKS menyampaikan pemikiran-pemikiran partai kepada kadernya?
4. Bagaimana cara PKS memajemen sumber daya manusia yang dimilikinya?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak di antaranya adalah :

1. Untuk ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini dapat terus memberi kontribusi dalam mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik. Diharapkan pula dapat menjadi salah satu referensi bagi perkembangan ilmu tersebut. Hingga akhirnya penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan ilmiah bagi siapa saja yang membutuhkannya.

2. Untuk masyarakat

Dari hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pola kaderisasi yang diterapkan oleh PKS. Sehingga mungkin bisa juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih partai politik. Lebih mengenal dengan partai politik yang ada, serta menguji isu-isu di masyarakat terkait dengan kaderisasi PKS.

3. Untuk PKS

Hasil penelitian ini bagi PKS bisa menjadi bahan pengujian apakah konsep kaderisasi yang dirumuskan oleh pimpinannya, telah berhasil diterapkan sampai kader di akar rumput atau tidak. Sehingga bisa juga menjadi bahan evaluasi apakah kaderisasi yang diterapkan baik atau tidak bagi perkembangan PKS.

4. Untuk peneliti

Peneliti menggunakan hasil penelitian ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang dipunyai peneliti. Agar menjadi tambahan wawasan keilmuan. Serta sebagai sarana informasi kondisi serta fenomena kepartaian yang ada di Indonesia.